

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR SEMERU  
Periode Januari s.d Desember 2019

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/ POJK.03 / 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 5 /SE OJK.03 /2016 tanggal 10 maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT , maka PT BPR SEMERU pada tahun 2020 ini merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari s.d Desember 2019 dengan mengacu pada prinsip – prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (accountability) , pertanggung jawaban ( responsibility) , independensi (independency) dan kewajaran ( fairness) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Keterbukaan ( Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
  - b. Akuntabilitas ( accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan efektif
  - c. Pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
  - d. Independenci ( independency) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh dan atau tekanan dari pihak mana pun .
  - e. Kewajaran ( fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan .
- I. POKOK POKOK ISI LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mengacu pada ps1 75 POJK no. 4 /2015 dan SE OJK no. 5 / 2015 tentang Penerapan Tata kelola BPR , pokok isi laporan disusun sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian factor – factor yang meliputi :
    1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
    2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris .
    3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite .
    4. Penanganan benturan Kepentingan.
    5. Penerapan fungsi kepatuhan , audit intern dan audit ekstern.
    6. Penerapan Manajemen resiko.
- 

7. Batas maksimum pemberian Kredit.
8. Rencana Bisnis BPR .
9. Transparansi Kondisi keuangan dan Non- keuangan .

Hasil penilaian (self assessment ) atas penerapan Tata Kelola BPR akan disajikan dalam kertas kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham Anggota Direksi serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan dewan Komisaris , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham .
- c. Kepemilikan saham Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lain , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.
- d. Paket /Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan dewan Komisaris
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- f. Frekwensi rapat dewan Komisaris
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BPR
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana .

## II. URAIAN DARI POKOK LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Ruang lingkup Tata Kelola  
( disajikan terlampir dalam Kertas Kerja Self assessment Penerapan Tata Kelola )
- b. Kepemilikan saham Anggota Direksi serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan dewan Komisaris , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.  
(NIHIL)
- c. Kepemilikan saham Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lain , anggota Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham.  
(NIHIL)



Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Dra. Ekawati
Komisaris	Lilis Setyowati SE
Direktur Utama	David Ardhiansyah SE
Direktur	Wisnu Widinatha SE

PEMEGANG SAHAM	NOMINAL	%
Drs. Agus Pramono	1.600.000.000	80%
PT. Saudara Jaya Abadi	400.000.000	20%
Total	2.000.000.000	100%

a. Paket /Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 2019

No	Paket /Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	Pengurus PT BPR SEMERU			
		Komisaris Utama	Komisaris	Direktur Utama	Direktur
1	Gaji/ Honor	11.000.000,-	8.000.000,-	23.000.000,-	19.000.000,-
2	Tunjangan:				
	a. Tunjangan Jabatan	Nihil		Nihil	Nihil
	b. Uang Makan	Nihil		Nihil	Nihil
	c. Pulsa	Nihil		Maksimal 400.000,- /bulan	Maksimal 400.000,- /bulan
3	Tantiem	Laba setelah pajak x 80% x 10,5%			
4	Kompensasi Berbasis Saham	Nihil			
5	Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan RUPS	Nihil			
6	Fasilitas lain yang diterima selain bentuk uang				
	a. Perumahan	Nihil			
	b. Transportasi	Nihil		1 unit mobil	1 unit mobil
	c. Asuransi Kesehatan	Sesuai tarif yang berlaku			

b. Rasio gaji tertinggi dan terendah , dalam skala perbandingan :

Rasio gaji pegawai tertinggi dibanding pegawai terendah 2,60 : 1

Rasio Gaji /Honor Direksi tertinggi dibanding Direksi terendah 1,21 :1

Rasio Honor Komisaris tertinggi dibanding Komisaris terendah 1,375 :1

Rasio gaji / honor Direksi tertinggi dengan Honor Komisaris tertinggi 2,09 :1

Rasio Gaji / honor Direski tertinggi dengan Gaji pegawai tertinggi 5,16: 1

c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Untuk kunjungan Komisaris Utama jika tidak halangan biasa dilakukan seminggu sekali dan ada Komisaris yang stay setiap harinya. Jumlah rapat yang diselenggarakan selama setahun sebanyak 14 kali.

2. Bahasan rapat Dewan Komisaris

Tanggal Pelaksanaan	Topik Bahasan Rapat
15 Januari 2019	Pemantapan RBB 2019
14 Januari 2019	Pemaparan program kerja SPV untuk penanganan T1-T3

12 Februari 2019	Pembahasan Bisnis BPR terkait Takeover dari Bank umum yang semakin masif
19 Februari 2019	Rancangan revisi Standart Operasional Prosedur Perkreditan BPR Semeru
5 Maret 2019	Pembahasan rencana penggunaan Laba ditahan dan modal inti 2019
26 Maret 2019	Review program APU & PPT terkait penentuan profil resiko , persiapan dana terkait ekspansi di Bulan Ramadhan
9 April 2019	Pengoptimalan SDM yg dimiliki (petugas UKK ) terkait dengan monitoring transaksi nasabah yang tidak wajar , NPL diupayakan < 5%
7 Mei 2019	LDR mendekati 90% , jika dana pihak k 3 dari masyarakat butuh proses , SDBL bisa sebagai alternative . Pemetaan nasabah yg nantinya akan masuk kategori DPK
11 juni 2019	LPDB ( Lembaga Pengelola Dana Bergulir ) sebagai pengganti alternative dana pihak ke 3 masyarakat atau SDBL . Potensi kerugian akibat kurang bayar pajak di tahun 2016 dan 2017 menurut kantor pajak ( krn terdapat perbedaan pengakuan PPAP antara Pajak Vs PA BPR )
9 juli 2019	NPL diupayakan dibawah 5%
6 Agustus 2019	Penambahan SDM AO Lending untuk mengerjakan kredit < 25 juta sebanyak banyaknya untuk meningkatkan NOA yang cenderung menurun yang berakibat pada resiko kredit tinggi. Frontliner agar lebih aktif & kritis mendalami informasi dari calon nasabah sehingga didapat gambaran kondisi keuangan nasabah yang mendekati riil .
10 September 2019	Rencana pelatihan Appresial Agunan Persiapan relokasi Kantor kas Ngaringan ke Pulokulon Penurunan NPL dan penanganan T3
1 Oktober 2019	Pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari OJK Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait pengambilan laba tahun lalu oleh PS



	Penyesuaian Skala Upah karyawan ( tunjangan tunjangan yang melekat )
15 Oktober 2019	Pengkinian data nasabah terkait dengan program APU&PPT Action plan NPL < 5% di Desember 2019 Rencana penggunaan dana CSR

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi di BPR dan upaya penyelesaiannya :  
(NIHIL)

h. Jumlah Permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BPR ;

No	Tanggal	Permasalahan Hukum	Penyelesaian
1	20 November 2019	Gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Satriyono (10000019217) plafond Rp. 250.000.000	Pihak Bank diputuskan menang gugatan oleh pengadilan negeri. Dan meminta debitur untuk melunasinya. Namun sampai dengan saat ini belum terlaksana , sehingga Bank akan mengajukan permohonan eksekusi
2	12 Desember 2019	Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri debitur a.n Sriyono (1000019118) plafond Rp. 80.000.000	Dilakukan mediasi dalam proses gugatan dan menghasilkan kesepakatan pelunasan di bulan Maret 2020 .

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan  
(NIHIL)

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik , baik penerimanya dan nominalnya ;

Penerima Dana	Acara	Tanggal	Nominal
Lembaga Investasi Negara	Khitanan Massal	18/03/19	100.000
Karyawan BPR SEMERU	Kelahiran anak karyawan	24/04/19	300.000
Karyawan BPR Semeru	Pernikahan	06/05/19	500.000
Paguyuban Pedagang Pasar Umum Godong	Sedekah Bumi	25/05/19	200.000
Yayasan Pendidikan Luar Biasa Purwodadi	Zakat fitrah	29/05/19	300.000

Kecamatan Ngaringan	HUT RI ke 74	04/07/19	300.000
De Bale Cingkrong	HUT RI ke 74	19/07/19	300.000
Kelurahan Danyang	HUT RI ke 74	19/07/19	300.000
PAMMI DPC Grobogan	HUT RI ke 74	19/07/19	300.000
Kecamatan Kradenan	HUT RI ke 74	26/07/19	300.000
Kecamatan Krng Rayung	HUT RI ke 74	26/07/19	300.000
Karyawan BPR Semeru	Uang duka cita	27/07/19	1.000.000
Desa Kenteng Kec. Toroh	HUT RI ke 74	30/07/19	200.000
Kel. Jetis RT 09 RW 16	HUT RI ke 74	30/07/19	300.000
Karyawan BPR Semeru	Uang Duka cita	03/08/19	500.000
Kecamatan Godong	HUT RI ke 74	06/08/19	300.000
Kelurahan Danyang	HUT RI ke 74	06/08/19	300.000
Kecamatan Wirosari	HUT RI ke 74	12/08/19	300.000
Lingkungan Bogasari	HUT RI ke 74	13/08/19	500.000
SMA N 1 Purwodadi	Diesnatalis	16/08/19	300.000
Ponpes Darul Falah Mbodo	Pengajian	08/10/19	600.000
Yayasan Bina Insan Murni	Pengajian	13/11/19	300.000
Mushola Nurul Huda Jetis	Pembangunan Mushola	02/12/19	300.000
Panitia Fun Aerobic	Fun aerobic hari Ibu	23/12/19	200.000
Karyawan BPR Semeru	Uang duka cita	31/12/19	500.000

PENUTUP

Laporan Penerapan Tata kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja PT BPR SEMERU selama setahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data / informasi strategis atau signifikan yang tertinggal. Namun demikian apa bila ditemukan dikemudian hari data / informasi penting yang belum dilaporkan , maka akan segera dilakukan up date data terhadap laporan ini .

Grobogan , 14 April 2020

PT BPR SEMERU

Komisaris Utama

Direktur Utama



(Dra. Ekawati)



PT. Bank Perkreditan Rakyat  
**SEMERU**  
PURWODADI - GROBOGAN



(David Ardhiarsyah SE)